

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

pemilihan kepala daerah (Pilkada) ponorogo tahun 2024 menjadi arena persaingan politik yang menarik perhatian public, terutama karena dinamika kompetisi yang cukup ketat antara pasangan calon Ipong Muchlissoni – Segoro Luhur Kusumo dan Sugiri Sancoko – Lisdiyariata. Dalam melaksanakan kampanye, masing-masing pasangan calon menerapkan beragam strategi komunikasi politik untuk menjangkau pemilih, tidak hanya melalui cara-cara konvesional seperti tatap muka dan pertemuan dengan Masyarakat, tetapi juga melalui pemanfaatan media sosial. Pasangan calon nomor 01 tampak aktif menggunakan media sosial sebagai sarana utama untuk menyampaikan program kerja, membangun citra positif kandidat, serta mempengaruhi opini publik. Aktivitas kampanye digital tersebut tidak berlangsung secara spontan, melainkan dikelola secara sistematis melalui tim khusus yang dikenal sebagai *buzzer* politik. (Sanofi, 2024).

Tim *buzzer* paslon 01 memiliki peran signifikan dalam membentuk persepsi Masyarakat, terutama di kalangan pemilih muda dan pengguna aktif internet. Mereka menjalankan strategi kampanye yang melibatkan produksi konten kreatif, distribusi informasi secara masif, hingga kontraposition terhadap serangan atau kritik dari pihak lawan. Kehadiran tim ini menjadi semacam perpanjangan tangan dari kandidat dalam ruang digital yang padat akan arus informasi dan perdebatan politik. Dalam praktiknya, mereka tidak hanya menyampaikan pesan-pesan positif, namun juga berperan sebagai pengendali opini yang bisa mempengaruhi arah dukungan Masyarakat (Pebrianti, 2024).

Sementara itu, paslon 02 juga tidak tinggal diam. Mereka menerapkan pendekatan kampanye yang berbeda lebih menekankan pada kedekatan personal dan kerja-kerja secara langsung dilapangan, meskipun kehadirannya tetap ada di media sosial. Strategi paslon 02 cenderung lebih

berhati-hati dalam melakukan manuver digital, tidak seagresif paslon 01 yang sangat terstruktur dalam mengelola narasi di ruang maya. Persaingan ini menampilkan adanya perbedaan pendekatan dalam membaca medan tempur politik digital, di mana paslon 01 menunjukkan kecenderungan untuk membentuk ekosistem informasi sendiri melalui tim-tim digital yang terorganisir (Dwi, 2024).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya pergeseran yang cukup signifikan dalam pola kampanye politik ditingkat lokal yang semakin mengandalkan pemanfaatan teknologi digital, khususnya sejak era 2020-an. Proses pilkada tidak lagi hanya berlangsung di ruang-ranag fisik seperti jalanan, balai desa, atau lapangan terbuka, melainkan juga merambah ke layer ponsel Masyarakat. Platform media sosial seperti facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp dimanfaatkan sebagai sarana utama untuk menyampaikan pesan kampanye, membentuk cita kandidat, serta memengaruhi emosi dan Keputusan politik pemilih.

Di Tengah pesatnya perkembangan dunia digital, strategi kampanye politik telah mengalami pergeseran dari cara-cara tradisional seperti penggunaan spanduk, baliho, maupun pertemuan langsung dengan Masyarakat. Kini, salah satu pendekatan yang semakin sering digunakan adalah layanan *buzzer* politik. Layanan ini fokus pada pembentukan opini public, mempengaruhi pandangan Masyarakat, serta mendongkrak popularitas kandidat atau partai melalui media sosial dan berbagai platfrom digital. Dengan memanfaatkan algoritma media sosial, *buzzer* politik dapat menciptakan tren, meningkatkan interaksi digital, dan menyusun narasi yang menguntungkan pihak yang mereka dukung (Ajeng, 2025).

Dinamika yang terjadi di Ponorogo merupakan cerminan dari fenomena nasional di mana politik digital memainkan peran sentral dalam membentuk narasi kampanye. Dalam pemilu nasional dan lokal, para kandidat kini berlomba-lomba memanfaatkan kekuatan media sosial sebagai ruang kampanye. Perkembangan tersebut melahirkan berbagai pendekatan baru dalam komunikasi politik, salah satunya melalui pemanfaatan tim *buzzer* sebagai penggerak utama penyebaran pesan politik.

Strategi ini memadukan penggunaan teknologi digital, kreativitas dalam pengemasan konten, pemahaman terhadap cara kerja algoritma media sosial, serta pengetahuan mengenai perilaku dan psikologi pemilih (Lifaudy, 2024).

Namun demikian, penerapan kampanye berbasis digital *buzzer* tidak terlepas dari berbagai permasalahan, meskipun dinilai efektif dalam membangun citra dan menjangkau Masyarakat secara luas, keberadaan *buzzer* kerap menimbulkan kaburnya batas antara informasi yang factual dan yang keliru. Praktik ini berpotensi mempengaruhi opini public secara tidak objektif, menyebarkan informasi, serta membentuk persepsi yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya. Bahkan dalam situasi tertentu, aktivitas *buzzer* dapat mengarah pada kampanye negative maupun penyebaran hoaks. Meski demikian, selama dijalankan sesuai dengan regulasi dan prinsip etika, peran *buzzer* masih dipandang sebagai bagian yang sah dari strategi komunikasi politik dalam sistem demokrasi (Wijayanto, 2023).

Pemilihan umum di Indonesia merupakan momenteum demokrasi yang krusial dalam menentukan arah kepemimpinan, baik di tingkat nasional maupun daerah kabupaten dan kota. Proses pemilu tidak semata-mata berkaitan dengan penampaian suara, tetapi mencangkup upaya para kandidat dalam menyampaikan visi, misi, serta membangun ciri politik di hadapan Masyarakat. Seiring pesatnya perkembangan teknologi, pola dan strategi kampanye politik pun mengalami transformasi yang cukup signifikan. Media sosial menjadi salah satu arena baru yang sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik, terutama di kalangan pemilih muda dan pengguna internet aktif (Setiawan & Djafar, 2023).

Perubahan cara berkomunikasi ini tidak terlepas dari meningkatnya penggunaan internet di Indonesia. Berdasarkan laporan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia setiap tahunnya. Sejak tahun 2018, jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat tercatat sebesar

64,8% dan naik menjadi 73,7% di tahun 2020, lalu 77,01% pada 2022, hingga mencapai 78,19% di tahun 2023. Berdasarkan jenis kelamin, komposisi pengguna internet relative seimbang dengan dominasi laku-laki sebesar 50,7% sementara Perempuan mencampai 49,1%. Jika ditinjau dari kelompok usia, pengguna terbanyak berasal dari generasi Z (kelahiran 1997-2012) dengan presentase 34,40%, diikuti oleh generasi milenial (kelahiran 1981-1996) sebesar 30,62%, dan generasi X (kelahiran 1965-1980) sebanyak 18,98%. Selain itu terdapat pula pengguna dari generasi pasca-Gen Z (kelahiran 2013 keatas) sebesar 9,17%, kelompok baby boomer (kelahiran 1946-1964) sebanyak 6,58%, serta pre-boomer (lahir sebelum 1945) dengan proporsi 0,24%. Dari segi wilayah, pengguna internet di daerah perkotaan mendominasi dengan angka 69,5%, sementara di daerah pedesaan sebesar 30,5%.

Dengan sebagian besar mengakses media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *X* (dulu *Twitter*), *TikTok*, dan *WhatsApp*. Fenomena ini dimanfaatkan oleh para politisi dan tim sukses mereka untuk menjangkau pemilih secara lebih luas, lebih cepat, dan lebih efektif. Kampanye melalui media sosial menjadi strategi yang tidak bisa diabaikan dalam kontestasi politik modern, karena sifatnya yang interaktif, personal, dan dapat menjangkau lintas daerah tanpa batasan geografis (APJII, 2024).

Salah satu fenomena yang menonjol dalam praktik kampanye digital adalah keberadaan tim *buzzer*, yakin kelompok atau akun yang bekerja secara terkoordinasi untuk memperluaskan informasi, membangun opini, serta mempengaruhi pandangan public terhadap kandidat tertentu. Tim ini umumnya aktif di berbagai platform media sosial dengan menyebarkan narasi yang mendukung kandidat yang diusung, sekaligus berupaya merendam atau menyerang isu-isu negative yang diarahkan kepada kandidat tertentu. Keberadaan mereka menambah dimensi baru dalam strategi komunikasi politik, karena mereka tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai penjaga citra dan pengarah opini publik (Rudi Trianto, 2023).

Pada Pilkada Ponorogo 2024, kedua pasangan calon bupati, termasuk kandidat nomor urut 1, dituntut untuk mengoptimalkan strategi kampanye mereka agar visi dan misi yang diusung dapat tersampaikan secara efektif kepada masyarakat luas (Dwi, 2024). Salah satu pendekatan yang digunakan dalam kampanye adalah dengan mengerahkan tim *buzzer* yang terstruktur, baik dalam hubungan vertikal dengan elite politik maupun horizontal dengan kelompok pendukung. Tim ini berperan dalam membentuk opini politik yang menguntungkan bagi kandidat. Selain berfungsi sebagai alat kampanye, keberadaan *buzzer* juga menciptakan peluang ekonomi baru, karena mereka bekerja berdasarkan permintaan dan proyek khusus selama masa kampanye (Putra, 2023).

Fenomena ini menggambarkan bagaimana kontestasi politik saat ini tidak hanya berlangsung di ruang-ruang terbuka seperti panggung kampanye atau baliho di pinggir jalan, tetapi juga secara intens terjadi di ruang digital. Persaingan antar kandidat pun tidak hanya berupa adu program dan janji politik, tetapi juga adu strategi digital dan pengaruh di media sosial. Dalam ruang digital ini, tim *buzzer* memainkan peran ganda: sebagai penyebar informasi sekaligus sebagai penjaga persepsi publik. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana sebenarnya strategi yang digunakan oleh tim *buzzer*, bagaimana pola kerja mereka, siapa yang menjadi target utama mereka, serta seberapa besar dampaknya terhadap pemilih (Hasna & Huwaida, 2024).

Selain menjadi ruang baru bagi kampanye politik, media sosial juga menciptakan tantangan tersendiri bagi proses demokrasi. Informasi yang tersebar dengan cepat tidak selalu dapat dipastikan kebenarannya, dan opini publik dapat terbentuk bukan berdasarkan fakta, melainkan pada narasi yang sengaja dibangun untuk kepentingan tertentu. Dalam kondisi tersebut, keberadaan tim *buzzer* menjadi semakin penting sekaligus menimbulkan kejadian. Disatu sisi, mereka ikut serta dalam meningkatkan eksposur kandidat serta menyebarkan pesan politik secara luas kepada Masyarakat. Namun di sisi lain, aktivitas *buzzer* juga berpotensi memicu polarisasi di Masyarakat, menyebarkan informasi yang tidak akurat, hingga melakukan

serangan terhadap lawan politik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap cara kerja dan strategi tim *buzzer* tidak hanya relevan bagi kajian komunikasi politik, tetapi juga penting sebagai bahan evaluasi untuk menjaga etika serta mutual demokrasi di Tengah perkembangan teknologi digital. (Szoka & Marcus, 2010).

Penelitian sebelumnya menjadi dasar bagi penelitian baru, sekaligus menjadi bahan pembanding dan pembedaan dengan penelitian-penelitian lain. Namun, dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, belum ada yang secara khusus membahas tentang struktur organisasi dan strategi kampanye yang dilakukan oleh *buzzer* dari kandidat nomor urut 01. Penelitian terdahulu hanya berfokus pada pola, strategi, atau peran *buzzer* di internet (Kurniawan & Alhaq, 2020; Wahyuni & Nguyet, 2022; Wijayanto et al., 2024). Tanpa mengkaji secara spesifik struktur internal dan dinamika tim yang terlibat. Padahal, untuk memahami secara menyeluruh peran *buzzer* dalam kampanye politik, penting juga untuk meneliti bagaimana tata kelola tim tersebut dijalankan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya meneliti tentang strategi dan struktur organisasi, tetapi juga menelusuri bagaimana tata kelola *buzzer* 01 dijalankan dalam konteks Pilkada Ponorogo 2024.

1.2. RUMUSAN MASALAH

- 1.2.1. Bagaimana pola, struktur, dan peran *buzzer* di media sosial?
- 1.2.2. Bagaimana tata kelola organisasi tim *buzzer* paslon 01 pada pemilihan kepala daerah Ponorogo tahun 2024?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian tentang strategi tim *buzzer* kandidat no 1 bupati ponorogo pada pilkada 2024 ini memiliki tujuan untuk:

- 1.3.1. Menganalisis pola, struktur, serta peran *buzzer* dalam aktivitas kampanye politik melalui media sosial.
- 1.3.2. Menguraikan secara mendalam bagaimana tata kelola organisasi tim *buzzer* paslon 01 dalam Pilkada Ponorogo tahun 2024, mulai dari proses pembentukan, pembagian tugas, hingga strategi pengelolaan komunikasi digital yang dijalankan.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Manfaat tersebut sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang komunikasi politik dan studi media digital. Dengan mengkaji strategi tim *buzzer* dalam kampanye politik lokal, penelitian ini dapat memperkaya teori-teori tentang komunikasi digital, *cyber troops*, dan pembentukan opini publik dalam konteks pemilu di era teknologi informasi. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, atau peneliti lain yang ingin mengkaji fenomena serupa di wilayah atau konteks politik yang berbedaan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi tim kampanye, pelaku politik, maupun praktisi komunikasi mengenai bagaimana memanfaatkan media sosial secara strategis dan terstruktur dalam kegiatan kampanye politik. Temuan dalam penelitian ini juga dapat membantu publik, khususnya pemilih, agar lebih sadar akan keberadaan *buzzer* dan dampaknya terhadap opini serta perilaku politik di media sosial. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membangun praktik kampanye yang lebih etis, transparan, dan bertanggung jawab di masa depan.

1.5. PENEGRASAN ISTILAH

1.5.1. *Buzzer* Politik

Kata *buzzer* berasal dari Bahasa Inggris yang secara harfiah berarti lonceng, bel, atau alarm. Sementara itu, menurut *Oxford Dictionaries*, *buzzer* didefinisikan sebagai '*An electrical device that makes a buzzing noise and is used for signalling*' yakni perangkat elektronik yang menghasilkan suara dengungan dan digunakan sebagai alat untuk memberikan sinyal atau tanda tertentu (Mustika, 2019).

Dalam konteks politik, istilah *buzzer* mengalami perluasan makna. *Buzzer* politik dapat dimaknai sebagai inividu atau kelompok yang secara aktif menyuarakan pandangan, menyebarkan informasi, serta menyampaikan pesan-pesan peruasif melalui media sosial guna mendukung kepentingan politik tertentu peran mereka meliputi pembentukan opini publik, penguatan citra tokoh atau partai yang mendukung, serta Upaya melemahkan lawan politik melalui narasi yang dikonstruksikan. Meskipun tidak selalu berada dalam struktur organisasi formal, aktivitas *buzzer* politik umumnya berjalan dalam jaringan yang terorganisir dan terkoordinasi, baik berbasis relawan maupun system berbayar, dengan tujuan mencapai efektivitas komunikasi politik optimal.

1.5.2. Black Campaign

Black campaign atau kampanye hitam adalah bentuk strategi komunikasi politik yang dilakukan dengan menyebarkan informasi negatif, fitnah, atau tuduhan tanpa bukti yang jelas untuk menjatuhkan citra lawan politik. Kampanye ini biasanya tidak fokus pada adu gagasan atau program kerja, melainkan lebih pada menyerang secara personal, menyebarkan isu-isu sensitif, atau memanfaatkan kesalahan lawan yang dilebih-lebihkan. Dalam konteks pemilu, black campaign sering dilakukan melalui media sosial atau pesan berantai agar cepat menyebar ke masyarakat luas. Meskipun tidak etis dan sering melanggar aturan pemilu, praktik ini masih kerap digunakan karena dianggap efektif dalam membentuk persepsi buruk terhadap lawan politik (Suyono, 2021).

1.5.3. Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah proses demokratis di mana masyarakat secara langsung memilih pemimpin daerahnya, seperti gubernur, bupati, atau wali kota, beserta wakilnya untuk masa jabatan tertentu. Pilkada merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang memberi kesempatan kepada rakyat untuk menentukan siapa yang akan memimpin daerahnya berdasarkan visi, misi, dan program kerja yang

ditawarkan para kandidat. Proses ini diatur oleh undang-undang dan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan tujuan mewujudkan pemerintahan daerah yang sah, akuntabel, dan sesuai dengan kehendak rakyat. Dalam konteks Pemilu 2024, Pilkada menjadi ajang penting untuk melihat dinamika politik lokal serta strategi kampanye yang digunakan oleh masing-masing calon, termasuk penggunaan media sosial dan *buzzer* (sutrisno, 2017).

1.5.4. Polarisasi Politik Digital

Munculnya perpecahan tajam dalam opini publik di media sosial sering kali disebabkan oleh eksposur terhadap informasi dan narasi kampanye yang ekstrem atau condong ke satu pihak. Biasanya, aktivitas *buzzer* memperparah kondisi ini dengan menyebarkan konten yang provokatif baik yang mendukung maupun menentang kandidat tertentu sehingga menciptakan polarisasi yang semakin intens. Studi menunjukkan bahwa *buzzer* politik memiliki kemampuan untuk memecah masyarakat daring melalui narasi-partisan serta manipulasi isu yang diarahkan secara sistematis untuk memperkuat dukungan atau oposisi terhadap figur politik tertentu (Sugiono, 2020).

1.5.5. Kampanye Terstruktur

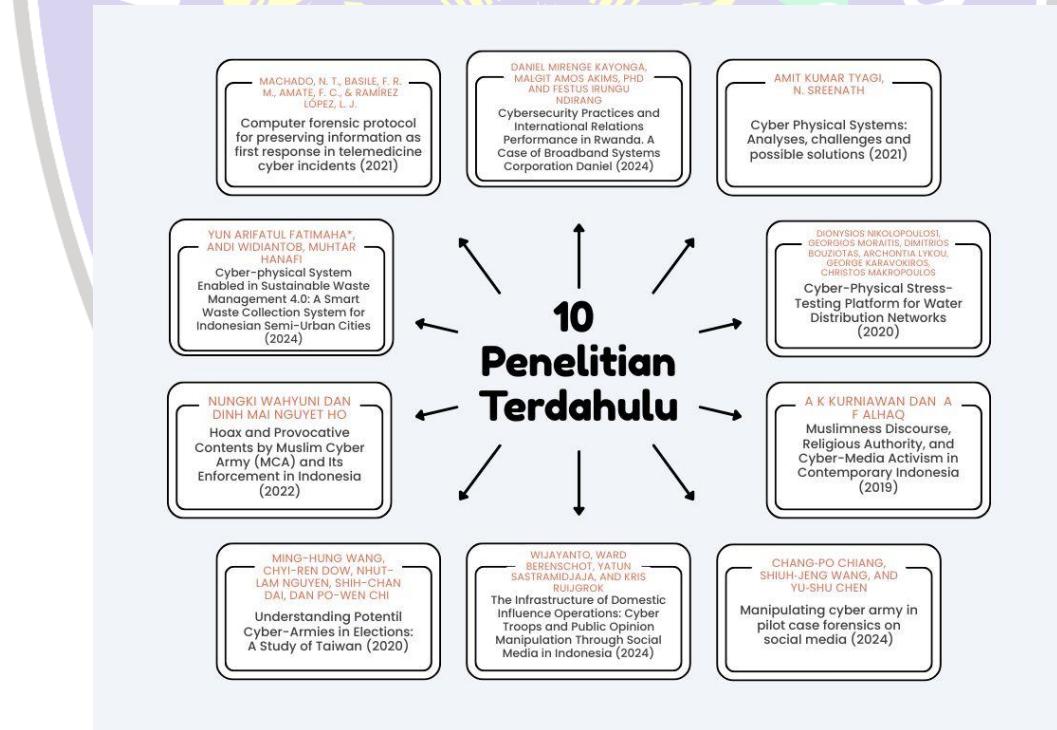
Kampanye terstruktur mengacu pada pengelolaan kegiatan kampanye yang disusun dengan tata kerja sistematis dan pembagian tugas yang jelas, bukan hanya asal unggah konten. Dalam tim *buzzer*, pendekatan ini terlihat dari bagaimana mereka merancang konten yang tepat, menentukan jadwal unggah yang efektif, membidik segmen audiens tertentu, serta melakukan evaluasi terhadap respons publik. Struktur seperti ini dengan hierarki dan koordinasi yang rapih memberi kekuatan pada strategi digital mereka, sehingga penyebaran pesan politik menjadi lebih tajam, terarah, dan berdampak luas di media sosial (Damiarti et al., 2019).

1.5.6. Framing Politik

Framing adalah teknik penyajian informasi dengan sudut pandang khusus yang dirancang untuk membentuk persepsi publik. Dalam politik

digital, teknik ini dipakai untuk memperkuat citra positif kandidat tertentu atau mengecilkan citra lawan melalui pilihan kata, visual, atau konteks penyampaian yang strategis. Tim *buzzer* memanfaatkan framing untuk membentuk narasi yang mendukung kandidat mereka, misalnya dengan menonjolkan prestasi, menyederhanakan isu kompleks, atau menyajikan fakta dengan interpretasi yang menguntungkan. Mereka juga siap melawan narasi negatif terhadap kandidat dengan framing tandingan yang dibuat secara cepat dan terstruktur termasuk penggunaan data, narasi alternatif, dan dukungan visual sehingga opini publik dapat diarahkan sesuai tujuan. Studi seperti yang dilakukan Pradana dkk. (2023) menunjukkan bahwa framing membantu media dalam membentuk opini publik tentang *buzzer* politik, menonjolkan aspek tertentu dan meredam yang lain (Deyu et al., 2023).

1.6. PENELITIAN TERDAHULU



Gambar 1. 1 Mindmap 10 Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat. Penelitian - penelitian tersebut dapat memprkuat argument serta membandingkan hasil yang diperoleh.

Penelitian ini ditulis oleh Nadjila Tejo Machado et al. (2021) Mengkaji kesalahan awal yang dapat menghambat pelestarian bukti dalam kejadian siber, seperti mematikan atau me-resart perangkat, penanganan tempat kejadian perkara yang tidak sesuai prosedur, serta kurangnya dokumentasi tindakan selama proses investigasi. Makalah ini dianalisis menggunakan pendekatan forensik digital yang meliputi pengelompokan tingkat akses pengguna, penentuan respon awal berdasarkan tingkat urgensi, serta tahapan akusisis data yang terdiri atas perencanaan, pengambilan, dan verifikasi. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya pemeliharaan rantai penyimpanan bukti guna mencegah kerusakan maupun pelanggaran terhadap integrasi data. Meskipun tidak secara eksplisit menguraikan Batasan penelitian, terhadap sejumlah Batasan yang dapat diidentifikasi, antara lain potensi hilangnya barang bukti akibat penanganan tempat kejadian yang kurang tepat, minimnya dokumentasi selama proses investigasi, kehilangan data akibat pemutusan daya, serta adanya perencanaan pengelolaan data yang memadai yang berdampak pada luasnya tanggung jawab setelah kejadian. Protokol yang jelas dalam menjaga jejak dan bukti digital sangat penting untuk respons insiden siber efektif. penetapan Tingkat akses pengguna dan klasifikasi urgensi membantu pengambilan Keputusan cepat, sementara rantai penyimpanan yang tertata mengurangi resiko kesalahan penanganan dan menjaga integritas bukti digital (MacHado et al., 2021).

Penelitian terdahulu yang kedua ditulis oleh Daniel Mirenge Kayonga et al. (2024) Menunjukan bahwa penerapan teknologi dan kebijikan keamanan *cyber* yang canggih di Rwanda, khususnya oleh *Broadband Systems Corporation*, berdampak positif terhadap hubungan internasional, termasuk peningkatan kerja sama dagang. Sistem deteksi gangguan dan enskripsi diakui efektif dalam melindungi data sensitif,

sementara analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor ini berkontribusi signifikan terhadap kinerja hubungan internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode campuran deskritif, korelasional, kualitatif, dan kuantitatif dengan data primer dan skunder. Data dua ratus dua puluh Sembilan responden, seratus empat puluh enam dipilih menggunakan rumus Slovin. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui pembayaran kuesioner dan dianalisis secara statistic dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25, termasuk uji korelasi bivariat untuk menguji hipotesis penelitian. Keterbatasan jumlah sampel, yang hanya melibatkan 131 responden, menjadi salah satu kendala dalam menggeneralisasikan hasil penelitian karena perpotensi menimbulkan bias dalam pemilihan sampel. Selain itu ruang lingkup penelitian yang terbatas pada konteks Rwanda membuat temuan penelitian belum tentu relevan atau dapat diterapkan pada negara lain yang memiliki latar belakang budaya serta kondisi ekonomi yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara praktik keamanan siber, seperti kebijakan, penggunaan teknologi, dan program pelatihan, dengan peningkatan kinerja hubungan internasional Rwanda. Analisis statistik mengonfirmasi bahwa faktor-faktor tersebut berkontribusi signifikan dalam menjelaskan keamanan siber memiliki peran penting dalam mendukung diplomasi serta melindungi data sensitive. Di samping itu, penerapan teknologi keamanan yang lebih maju terbukti mampu memperkuat kerja sama perdangan dan hubungan global (Daniel Mirenge Kayonga, Malgit Amos Akims, 2024).

Penelitian ini membahas tantangan dan celah penelitian dalam keamanan sistem fisik siber (CPS). Yang ditulis oleh Amit Kumar Tyagi et al. (2024) yang ditekankan untuk peningkatan stabilitas dan efisiensi dalam desain dan operasinya. Integrasi CPS dan IoT dan komputasi awan dianggap sebagai peluang riset yang menjajikan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya mengatasi kerentanan keamanan karena meningkatnya ancaman siber, serta merangkum beberapa upaya terbaru untuk meningkatkan keamanan CPS. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori dan metode formal berbasis abstraksi dalam

perancangan, pengembangan, dan pengujian system siber-fisik (CPS). Model formal digunakan untuk mempermudah Pembangunan dan integrasi system. Penelitian ini juga menggaris bawahi perlunya Langkah-langkah keamanan seperti kriptografi, control akses, dan deteksi intrusi, terutama pada CPS di bidang medis (MCPS), untuk meningkatkan keamanan dan kinerjannya. Didalam penelitian ini menyoroti bahwa banyak system siber-fisik (CPS), khususnya dibidang medis (MCPS), belum dirancang dengan keamanan sebagai fokus utama, sehingga rentan dengan serangan siber dan akses data yang tidak sah. Perlindungan yang ada, seperti perpustakaan obat dan batas pengaturan, belum mampu mengatasi semua situasi klinis. Kompleksitas dan skala CPS yang beragam menjadi tantangan besar dalam menjaga keamannya. Selain itu, keterbatasan teknologi perangkat medis dalam memantau pasien secara efisien menjadi hambatan penting dalam mengembangkan system yang aman dan andal. Penelitian ini menyoroti tentang meningkatnya penggunaan CPS, khususnya dibidang medis, namun masih rentan karena desain keamannya lemah, perlunya standar, konsep yang jelas, dan integritas keamanan sejak awal lebih ditekankan. Ancaman utama meliputi pelanggaran privasi dan kerentanan system, sehingga riset lanjutan diperlukan untuk meningkatkan keamannya (Tyagi & Sreenath, 2021).

Penelitian terdahulu selanjutnya ditulis oleh Yun Arifatul Fatimah et al. (2024) Membahas tentang prototipe system pengumpulan sampah pintar yang diuji di laboratorium untuk melihat efisiensinya. System ini terdiri dari sensor, mikrokontroler, servo, dan ponsel yang terhubung lewat IoT. Empat mikrokontroler digunakan untuk fungsi seperti autentikasi RFID dan pengukuran sampah. Pengguna bisa memakai kartu identitas untuk melihat data dan Riwayat sampah melalui dasbor. Penelitian ini menunjukkan pentingnya peran TIK dan IoT dalam meningkatkan pengelolaan sampah. Penelitian ini mengembangkan system pengumpulan sampah cedar dengan menggabungkan dunia fisik dan digital. Kajian pustaka dan observasi langsung digunakan untuk membangun model awal, dilanjutkan dengan perancangan system dan proses bisnis. Evaluasi dilakukan melalui simulasi

kuantitatif proses pengumpulan sampah dan penilaia kualitatif dan para pemangku kepentingan. Makalah ini membahas tentang intervensi pemerintah dalam teknologi pengelolaan limbah masih rendah, sementara biaya Pembangunan system CPS cukup mahal. Keterbatasan internet dan bandwidth mengganggu kinerja system. Koordinasi antara perangkat fisik dan digital juga masih sulit, selain itu, minimnya keterampilan untuk mengoprasikan system baru menjadi hambatan bagi bank sampah. Upaya pemerintah belum banyak mendukung pengembangan teknologi, dan informasi tentang system pengelolaan limbah modern masih terbatas. Penelitian ini membuat system pintar untuk mengelola sampah secara efisien di daerah semi perkotaan dengan menggabungkan teknologi fisik dan digital (CPS). Sistem ini membantu pengumpulan sampah jadi lebih hemat energi dan biaya, serta berdampak positif bagi Kesehatan. Sensor dan teknologi otomatis digunakan untuk mengenali jenis sampah, sehingga pengelolaan jadi lebih transparan dan mudah dilacak. Studi kusus di magelang membuktikan system ini bisa diterapkan. Metode yang digunakan meliputi kajian pustaka, perancangan system, dan simulasi (Fatimah et al., 2020).

Makalah ini membahas studi kasus untuk menguji platform RISKNOUGHT dalam mensimulasikan serangan siber-fisik menggunakan model C-town yang ditulis oleh Dionysios Nikolopoulos et al. (2020) penelitian ini menguji lima jenis serangan yang memperlihatkan dampak signifikan dari akses jarak jauh serta celah keamanan terhadap system fisik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan pasokan dan permintaan air. Temuan penelitian menunjukkan adanya resiko gangguan layanan sekaligus mengidentifikasi keluhan pada unit historian. Selain itu, studi ini membuktikan bahwa RISKNOUGHT merupakan alat yang efektif dalam menguji ketahanan system siber-fisik. Analisis yang dilakukan berfokus pada kerentanan yang respons system dengan menelaah ketertarikan antara ranah digital dan aspek fisik. Data dan kode penelitian tersedia jika diminta, sehingga hasilnya transparan dan bisa diuji ulang. Penelitian ini juga

menekankan perlunya kerangka kerja yang komprehensif untuk keamanan sistem air siber-fisik (Nikolopoulos et al., 2020).

Penelitian ini ditulis oleh Nungki Wahyuni (2022). Membahas tentang hubungan antara hukum, khususnya hukum dan teknologi, dengan meningkatkan kejahatan siber di Indonesia, terutama oleh kelompok Muslim *Cyber Army* (MCA). Bentuk kejahatan yang dibahas dalam makalah ini meliputi aktivitas spionase, sabotase, pemasaran illegal, penalsuan data, serta penyebaran informasi palsu. Proses globalisasi dan perkembangan teknologi dinilai turut mempercepat distribusi informasi yang tidak benar, sehingga berpotensi mendorong meningkatnya tindak kejahatan dan keresahan di Masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan regulasi hukum yang lebih tegas dipandang penting untuk menanggulangi kejahatan siber tersebut. Dalam proses penyusunannya, makalah ini menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan berbagai sumber yang relevan terkait kejahatan siber, khususnya yang berkaitan dengan muslim *Cyber Army*. Data diperoleh dari buku, laporan serta catatan yang mendukung pembahasan. Penarikan Kesimpulan didasarkan pada hasil analisis terhadap materi yang dikaji, sementara bagian abstrak menekankan dampak negative kejahatan siber sebagai latar belakang penelitian. Kajian ini berfokus pada relasi antara hukum dan teknologi dalam Upaya penanganan kejahatan siber, dengan studi kasus Muslim *Cyber Army* di Indonesia. Dibahas juga dampak negatif globalisasi dan teknologi yang memicu meningkatnya kejahatan siber. Penelitian ini berdasarkan studi literatur, dan kesimpulannya menekankan pentingnya aspek hukum dalam menghadapi kejahatan tersebut (Wahyuni & Nguyet, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh A. K. Kurniawan dan Alhaq (2019) menili peran media digital dalam mempengaruhi cara umat islam mengekspresikan keimanan mereka di ruang public, terutama dalam konteks demokrasi. Studi ini menyoroti munculnya berbagai Gerakan islam baru, seperti Aksi Bela Islam dan fenomena hijrah, yang dianggap menantang otoritas keagamaan tradisional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam membentuk opini public dan

memobilisasi dukungan, khususnya dikalangan generasi muda. Selain itu, peyebaran symbol-simbol islam melalui media digital dinilai dapat mendukung penguatan demokrasi dari kebragaman, meskipun tetap menghadirkan tantangan terkait ideologi radikal. Penelitian ini menggunakan metode observasi media sosial dan analisis wacana untuk memahami konstruksi symbol dan identitas islam, serta menerapka pendekatan etnografi visual dan tnografi lapangan untuk mengamati penyebaran symbol-simbol tersebut di ruang public muslim. Temuan penelitian juga menampilkan bagaimana nilai-nilai Islam dimanfaatkan sebagai sarana untuk menarik dukungan politik. Analisis Wacana Kritis Fairclough digunakan untuk melihat perubahan otoritas dalam wacana keagamaan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pilihan politik dan emosi masyarakat Indonesia sangat beragam, tidak selalu sejalan dengan pandangan ulama tradisional. Kelompok Islam baru seperti FPI dan organisasi transnasional mulai bermunculan di luar NU dan Muhammadiyah. Penyebaran symbol-simbol islam di ruang public menunjukan hubungan yang kompleks dengan demokrasi dan keberagaman. Meskipun terdapat kelompok radikal, Sebagian besar Masyarakat (80,1%) tetap bersikap moderat dan terbuka. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana pesan-pesan islam mempengaruhi pembentukan identitas dan praktik kesalehan public, serta peran media digital dalam menggeser otoritas keagamaan, khususnya dikalangan milenial. Seiring perkembangan pesan-pesan keislaman historis, identitas eagamaan Masyarakat pun semakin kuat (Kurniawan & Alhaq, 2020).

Penelitian ini ditulis oleh Ming-Hung Wang et al. (2020) Penelitian ini menggunakan observasi media sosial dan analisis wacana untuk memahami simbol dan identitas Islam. Etnografi visual dan lapangan dilakukan untuk melihat penyebaran simbol-simbol Islam, terutama di ruang publik Muslim. Studi ini juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam digunakan untuk menarik dukungan politik. Analisis Wacana Kritis Fairclough digunakan untuk melihat perubahan otoritas dalam wacana keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode sistematis dan analisis

statistic untuk mengidentifikasi akun professional beserta ciri-cirinya, dengan data dikumpulkan selama enam bulan. Data diambil dari forum politik popular di Taiwan menjelang pemilu 2018 dan dikelompokan berdasarkan aktivitas online seperti komentar dan penilaian. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa mengungkap kebenaran tentang pasukan siber sulit dilakukan tanpa penyelidikan resmi pemerintah. Alogaritma yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas karena hanya berfokus pada pola pengulangan cuitan, tanpa memperhitungkan bentuk perilaku lain seperti aktivitas pemberian peringkat. Penelis juga menekankan adanya kesulitan dalam membedakan akun bot dan akun manusia, mengingat aktivitas bot cenderung terlihat teratur dan konsisten. Hasil studi mengidentifikasi keberadaan akun-akun professional di media sosial yang berperan dalam memengaruhi opini public selama masa pemilihan umum. Akun-akun tersebut menunjukkan aktivitas tinggi pada hari kerja dan respons yang cepat, yang mengidentifikasi adanya pola kerja yang terorganisir. Dta penelitian ini bersumber dari artikel-artikel yang membahas kandidat tertentu. Temuan ini menyoroti bahaya misinformasi dan pentingnya transparansi demi menjaga demokrasi (Wang et al., 2020).

Penelitian ini ditulis oleh Wijayanto (2024). Mengungkapkan bahwa pasukan siber di Indonesia bersifat rahasia, terkoordinasi, dan memakai akun anonim. Mereka bekerja secara proyek, dipimpin oleh koordinator yang mengatur konten dan waktu posting. Temuan ini menunjukkan bahwa pasukan siber ikut memperkuat sifat oligarki dalam demokrasi Indonesia. Penelitian ini melibatkan wawancara terhadap 52 anggota pasukan siber di Indonesia dengan tujuan memahami pola kerja dan mekanisme operasional mereka. Dalam proses pengumpulan data, peneliti dibantu oleh peneliti lokal untuk menjalin akses dengan para informan. Selain wawancara, penelitian ini juga memanfaatkan perangkat analisis untuk mengidentifikasi akun-akun mencurigakan yang berkaitan dengan informasi publik pada periode 2019–2020. Seluruh wawancara dilakukan dalam Bahasa Indonesia, kemudian dianalisis untuk mengkaji struktur organisasi serta tingkat koordinasi antar anggota pasukan siber. Makalah ini menegaskan

bahwa data hasil wawancara bersifat sensitif, sehingga transkrip tidak dipublikasikan secara terbuka. Penulis juga mengakui adanya potensi bias dalam pemilihan informan karena sebagian besar responden berasal dari wilayah Jakarta. Selain itu, temuan penelitian belum sepenuhnya mewakili seluruh aktor yang terlibat dalam operasi pasukan siber di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasukan siber memiliki karakteristik yang khas, antara lain pendanaan yang bersifat tertutup, struktur organisasi yang rapi, serta penggunaan akun anonim. Di Indonesia, aktivitas pasukan siber umumnya bersifat sementara dan berbasis proyek, mirip dengan pola kerja dalam kampanye pemilu. Wawancara terhadap 52 pelaku memberikan gambaran mendalam mengenai struktur, sumber pendanaan, serta motivasi yang melatarbelakangi keterlibatan mereka. Hasilnya menunjukkan bahwa aktivitas ini memperkuat sifat oligarki dalam demokrasi Indonesia dan berdampak besar pada ruang public (Wijayanto et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Chang-Po Chiang (2021) membahas pengaruh pasukan siber, yang ditunjukkan terutama oleh kecepatan munculnya komentar, bukan oleh adanya bias opini. Artikel dengan Panjang yang signifikan dan jumlah komentar pada isu politik domestic. Jenis media yang digunakan ternyata tidak terlalu mempengaruhi hasilnya, dan temuan ini dapat dijadikan dasar bagi penelitian lanjutan terkait manipulasi media sosial. Penelitian ini memakai algoritma dan analisis statistik seperti Louvain, Chi-square, dan regresi logistik untuk mengkaji interaksi di media sosial. Sebanyak 95 artikel dianalisis untuk melihat pola posting dan komentar. Hasilnya mendukung dugaan bahwa pasukan siber memengaruhi opini publik secara detail dan menyeluruh. Makalah ini menyebutkan bahwa cara kerja pasukan siber belum dijelaskan dengan jelas. Topik dan waktu posting tidak terlalu berpengaruh. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa anggapan umum tentang manipulasi politik oleh pasukan siber tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta. Studi ini menunjukkan bahwa pasukan siber memengaruhi opini publik lewat komentar terorganisir dan cepat. Artikel yang panjang dan banyak komentar punya dampak lebih besar.

Temuan ini juga bisa digunakan untuk menilai isu di luar politik, karena relevansinya luas (Chiang et al., 2022).

1.7. LANDASAN TEORI

1.7.1. Teori *Cyber Troops*

Cyber troops adalah sebutan untuk kelompok atau individu yang secara terorganisir melakukan manipulasi opini publik melalui internet, terutama media sosial, demi kepentingan politik tertentu. Woolley dan Howard (2017) mendefinisikan *cyber troops* sebagai “government or political party actors tasked with manipulating public opinion online.” Dalam konteks ini, para aktor digital tersebut dapat berasal dari institusi resmi seperti partai politik atau lembaga negara, maupun kelompok relawan dan tim tidak resmi, yang dibentuk khusus untuk menyebarkan propaganda, informasi politik, dan narasi strategis. Mereka kerap memanfaatkan akun palsu, bot otomatis, serta strategi manipulasi algoritma media sosial untuk menimbulkan kesan bahwa suatu pendapat didukung oleh banyak orang. Fenomena ini mencerminkan perubahan cara komunikasi politik di era digital, dimana ruang public tidak lagi terbatas pada interaksi fisik, tetapi juga berkembang secara intens di ranah dunia maya (Woolley & Howard, 2017).

Tujuan utama keberadaan *cyber troops* adalah memengaruhi opini publik dan arah percakapan digital agar berpihak pada kandidat atau pihak tertentu. Fungsi mereka sangat erat kaitannya dengan pembentukan citra, penguatan dukungan elektoral, serta pengaburan isu-isu kritis yang dapat merugikan pihak yang mereka bela. Sebagaimana disebutkan oleh Lim (2020), “*Digital propaganda is not merely about lying to people, but about overwhelming and confusing them into silence or inaction.*” Dalam konteks ini, *cyber troops* bukan hanya menyebarkan informasi palsu, tetapi juga menciptakan kebisingan digital (information noise) yang menyulitkan masyarakat untuk membedakan fakta dan opini. Akibat praktik ini, pemilih menjadi lebih mudah terpengaruh dan diarahkan untuk mempercayai suatu narasi, meskipun keberadaannya belum tentu terbukti secara faktual. Oleh

karena itu, peran cyber troops sangat krusial dalam strategi komunikasi politik modern, khususnya dalam kontestasi pemilu yang ketat (Lim, 2020).

Cyber troops ditandai dengan cara kerja yang sistematis dan terstruktur, seringkali berjalan secara tersembunyi. Mereka biasanya beroperasi dalam jaringan yang dikendalikan oleh organisasi tersembunyi. Mereka biasanya beroprasi dalam jaringan yang dikendalikan oleh seorang coordinator atau puast komando, yang bertanggung jawab mengatur penyebaran konten, narasi, serta timing publikasinya. Di lapangan, *cyber troops* sering dibekali dengan narasi harian, arahan gaya bahasa, hingga visual kampanye untuk memastikan keseragaman pesan. Tindakan mereka juga dapat mencakup penyebaran meme, video singkat, hingga berita palsu yang dikemas secara menarik untuk viral di berbagai kanal (Bradshaw & Howard, 2019). Howard dan Bradshaw (2019) menjelaskan bahwa *cyber troops* dapat dibedakan menjadi lima Dimensi yaitu:

a) Menyebarluaskan Propaganda Pro-Pemerintah atau Pro-Kandidat

salah satu strategi utama yang dijalankan oleh *cyber troops* adalah penyebaran propaganda untuk mendukung pemerintah atau kandidat tertentu. Propaganda ini dirancang untuk mendukung pemerintah atau kandidat tertentu. Propaganda ini dirancang secara sistematis untuk membentuk opini public dengan mengulang narasi yang menguntungkan pihak terkait. Di mesia sosial, bentuknya bervariasi, mlai dari video, permainan artikel, hingga unggahan yang tampak organic, meskipun sebenarnya diproduksi secara terkoordinasi oleh tim khusus. Konten tersebut bertujuan untuk memperkuat citra positif tokoh atau institusi yang didukung. Sekligus menumbuhkan loyalitas emosional Masyarakat terhadap figure tersebut. Dalam laporan Oxford Internet Institute disebutkan bahwa “*cyber troops frequently engage in pro-government or pro-party messaging to shape favorable public opinion*”.

b) Menyerang Lawan Politik

Serangan terhadap lawan politik menjadi praktik yang umum dilakukan oleh *cyber troops* demi menjatuhkan kredibilitas pihak

oposisi. Serangan semacam ini tidak hanya sekedar kritik terhadap kebijakan, tetapi juga memuat hoaks, fitnah, dan label negative yang disebarluaskan secara masif melalui jaringan akun palsu dan bot otomatis. Tujuannya adalah menciptakan persepsi negatif di Masyarakat terhadap lawan politik sekaligus membatasi ruang Gerak mereka di ranah public digital. Menurut Bradshaw dan Howard, praktik ini merupakan bentuk manipulasi yang berbahaya karena berpotensi merusak kualitas diskursus demokratis. Dalam laporan mereka dijelaskan bahwa “*troll accounts are often used to attack opposition politicians, civil society activists, and dissidents*”

c) Menekan Jurnalis Independent

Menekan jurnalis independen juga menjadi bagian dari aktivitas *cyber troops* dalam mengendalikan informasi publik. Para jurnalis yang kritis terhadap pemerintah atau mengungkap fakta-fakta yang merugikan tokoh tertentu sering menjadi sasaran serangan digital seperti doxing, pelecehan daring, atau kampanye pembunuhan karakter. Tindakan ini dilakukan untuk membungkam suara-suara kritis dan menciptakan efek jera terhadap media lainnya. Akibatnya, ruang kebebasan pers di media sosial menjadi menyempit, dan masyarakat hanya mendapatkan informasi yang telah dipoles oleh aktor politik. Bradshaw dan Howard menekankan bahwa “*independent media and investigative journalists are common targets of harassment by organized propaganda efforts*”

d) Menekankan Polarisasi

Cyber troops juga menggunakan strategi polarisasi untuk memecah belah opini public berdasarkan identitas kelompok, seperti ras agama, ras, atau orientasi politik. Mereka sengaja menyebarkan narasi yang menekankan perbedaan dan memperburuk ketegangan antar kelompok, sehingga tercipta konflik sosial yang menguntungkan pihak tertentu. Dampaknya, Masyarakat menjadi sulit melakukan dialog yang sehat dan lebih mudah terpengaruh oleh narasi ekstrem. Dalam laporan Oxford Internet Institute dijelaskan

bahwa “*cyber troops often exploit social divisions and amplify cultural or religious conflicts to destabilize democratic discourse*”

e) Memanipulasi Algoritma Platform

Manipulasi algoritma platform merupakan strategi teknis yang digunakan untuk membuat konten tertentu menjadi viral atau muncul di halaman teratas pencarian dan trending topic. *Cyber troops* memanfaatkan bot otomatis, akun palsu, dan aktivitas posting terkoordinasi untuk ‘mengelabui’ algoritma media sosial agar konten mereka mendapatkan jangkauan lebih luas. Ini membuat narasi buatan mereka tampak seolah-olah merupakan opini publik yang dominan, padahal telah direkayasa. Bradshaw dan Howard mencatat bahwa “*cyber troops use algorithmic manipulation and hashtag engineering to dominate online discourse and drown out dissent*”

f) Koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication*)

Koordinasi antaranggota serta kelancaran dalam komunikasi menjadi aspek yang sangat penting dalam tata kelola administrasi, khususnya dalam konteks kerja tim *buzzer* pada kampanye politik. Di dalam tim yang bergerak di dunia digital seperti ini, setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, sehingga dibutuhkan komunikasi yang intens dan saling terhubung agar tidak terjadi miskomunikasi atau tumpang tindih dalam pelaksanaan strategi. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa pesan kampanye yang disampaikan kepada public tetap konsisten, tidak saling bertantangan, dan mampu untuk membangun citra positif calon. Selain itu, koordinasi yang baik memungkinkan tim untuk merespons dengan cepat berbagai isu atau serangan politik yang muncul di media sosial, melalui narasi tandingan atau klarifikasi. Dengan demikian, komunikasi dan koordinasi yang terorganisir menjadi pondasi penting agar strategi tim *buzzer* dapat dijalankan secara terstruktur, fokus,, dan memberikan pengaruh maksimal terhadap opini public selama periode kampanye.

Dalam kampanye politik digital, pasukan siber mengambil berbagai peran, mulai dari tim kreatif yang membuat konten, operator media sosial, hingga mengatur percakapan publik. Di Indonesia, fenomena ini berkembang pesat sejak Pilpres 2014 dan semakin tampak dalam berbagai Pilkada. Laporan Oxford Internet Institute (2019) menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan aktivitas pasukan siber yang tinggi, terutama pada masa pemilu. Tim ini biasanya mengoperasikan akun-akun media sosial untuk mendukung narasi positif bagi kandidat tertentu, menyoroti kelemahan lawan secara halus, serta menciptakan kesan bahwa dukungan publik terhadap pihak tertentu sangat luas. Aktivitas ini sering dilakukan secara berulang dan terjadwal, menyesuaikan dengan momentum kampanye serta dinamika isu yang muncul di masyarakat. (Bradshaw et al., 2021).

Keberadaan pasukan siber menimbulkan kekhawatiran serius terhadap etika politik dan kualitas demokrasi. Aktivitas mereka yang sering bersifat anonym, manipulative, dan memanfaatkan informasi palsu berpotensi melemahkan prinsip demokrasi, seperti transparansi, kejujuran dan partisipasi public yang sehat. Menurut Gunitsky (2015), praktik manipulative semacam ini mengancam integritas ruang public digital dan berpotensi menimbulkan apa yang disebut “pergeseran otoriter” bahkan di negara-negara demokratis. Selain itu, penggunaan *buzzer* politik dan pasukan siber dapat memperkuat polarisasi, karena narasi yang dibangun cenderung bersifat ekstrem, menyerang lawan, dan memecah belah Masyarakat. Dalam konteks Pilkada, kondisi ini berisiko menurunkan kualitas pemilu serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. (Gunitsky, 2015).

Dalam Pilkada Ponorogo 2024, pasukan siber berperan sebagai komponen penting dalam strategi digital kandidat. Mereka berperan menyebarkan citra positif, menjangkau pemilih muda, serta membentuk persepsi digital yang menguntungkan. Misalnya, kandidat nomor 1 didukung oleh tim *buzzer* yang berfungsi mirip dengan pasukan cyber, mulai dari memproduksi dan mendistribusikan konten kampanye,

menanggapi narasi negatif, hingga membingkai isu-isu politik lokal agar sejalan dengan citra kandidat. Kehadiran tim semacam ini menunjukkan bahwa politik lokal juga telah mengalami transformasi digital, di mana keberhasilan kampanye tidak hanya ditentukan oleh aktivitas di lapangan, tetapi juga oleh pengaruh di media sosial. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, *cyber troops* dipahami sebagai bagian dari strategi kampanye digital yang secara langsung memengaruhi dinamika opini publik di ruang digital Ponorogo.

1.8. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam penelitian ini, definisi operasional berfungsi untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci dan jelas tentang arti dari setiap konsep yang diteliti. Tujuannya adalah agar setiap konsep tersebut tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga bisa diterapkan dan diukur secara nyata di lapangan. Dengan adanya definisi operasional, dapat menentukan indikator atau bentuk nyata dari suatu konsep, sehingga proses pengumpulan data menjadi lebih terarah dan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan *theory cyber troops*, menurut Howard dan Bradshaw (2018) terdapat lima Dimensi yang menjelaskan sistem kerja utama *cyber troops* dengan acuan data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 1. 1 Dimensi dan Data Yang Diperoleh di Lapangan

Dimensi	Data Yang Dicari
Menyebarluaskan propaganda pro-pemerintah atau pro-kandidat	<ol style="list-style-type: none">1. Ditemukan konten digital berupa unggahan gambar, video, hingga narasi positif yang terus-menerus memuji program, visi-misi, dan kepribadian kandidat tertentu.2. Penyebarluasan konten dilakukan secara serempak oleh akun-akun <i>buzzer</i> dalam

	waktu yang hampir bersamaan, menunjukkan adanya koordinasi.
Menyerang lawan politik	<p>3. Munculnya konten bernada negatif seperti meme menghina, fitnah personal, hingga penyebaran hoaks terhadap lawan politik.</p> <p>4. Akun-akun anonim maupun akun pendukung terlihat aktif memancing opini negatif di kolom komentar dan diskusi.</p>
Menekan jurnalis independent	<p>5. Terdapat serangan digital berupa pelabelan miring terhadap jurnalis atau media yang kritis terhadap kandidat, seperti menuduh “tidak netral” atau “dibayar oposisi.”</p> <p>6. Ditemukan komentar kasar, penyebaran identitas pribadi (doxing), dan ajakan boikot terhadap media tertentu.</p>
Menekankan polarisasi	<p>7. Banyak konten yang membangun dikotomi “kami vs mereka” atau “nasionalis vs pengkhianat” untuk memperkuat basis pendukung dan memperlemah kelompok lain.</p> <p>8. Komentar dan tagar yang muncul secara masif mendorong perpecahan atau memancing emosi audiens dengan isu SARA dan ideologis.</p>
Memanipulasi algoritma	9. Ditemukan aktivitas masif penggunaan tagar atau kata kunci tertentu untuk

	<p>menaikkan visibilitas konten ke trending topic.</p> <p>10. Banyak akun palsu (bot) dan akun tidak aktif sebelumnya tiba-tiba aktif menyukai, me-retweet, dan mengomentari konten dengan pola identik.</p>
Koordinasi dan Komunikasi (<i>Coordination and Communication</i>)	<p>11. Frekuensi koordinasi tim <i>buzzer</i> melalui grup WhatsApp atau rapat daring</p> <p>12. Kecepatan dan kejelasan komunikasi dalam merespons isu politik di media sosial</p>

(Sumber: Diperoleh Dari Olah Data Penelitian)

1. Menyebarluaskan propaganda pro-pemerintah atau pro-kandidat
Penyebarluasan propaganda yang mendukung pemerintah atau kandidat tertentu dapat dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan secara terencana untuk menyebarluaskan berbagai informasi di media sosial dengan tujuan membela, mengangkat atau memperkuat citra positif pihak yang didukung. Aktifitas ini dapat dilakukan memulai akun resmi maupun anonym yang sengaja dibuat untuk keperluan kampanye digital. Tujuan utamanya adalah membentuk persepsi public agar lebih condong positif terhadap pihak tertentu, sehingga dapat mempengaruhi opini dan pilihan politik Masyarakat. Konten yang disebarluaskan biasanya dibuat semenarik mungkin agar mudah dipercaya, dibagikan ulang, dan menjadi bagian dari percakapan publik di dunia maya.

2. Menyerang lawan politik

Menyerang lawan politik diartikan sebagai segala bentuk aktivitas komunikasi di media sosial yang dilakukan oleh akun-akun yang terhubung dengan tim *cyber troops*, dengan tujuan utama menjatuhkan atau merusak citra lawan politik dari kandidat yang mereka dukung. Serangan ini bisa dilakukan secara terbuka maupun tersembunyi, seperti melalui penyebaran berita bohong (hoaks), pembocoran data pribadi (doxing), atau pembuatan narasi negatif yang dirancang untuk menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lawan tersebut. Strategi ini biasanya dilakukan secara masif dan terkoordinasi untuk memengaruhi opini publik, menciptakan kesan buruk, dan memperlemah dukungan terhadap pihak yang menjadi sasaran.

3. Menekan jurnalis independent

Menekan jurnalis independen dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara sengaja dan terorganisir untuk menyerang jurnalis atau media yang dinilai tidak mendukung atau bahkan mengkritik kandidat tertentu. Tekanan ini biasanya dilakukan melalui berbagai cara di dunia digital, seperti menyebarkan informasi palsu tentang jurnalis tersebut, melakukan pelecehan secara online, atau membanjiri mereka dengan komentar negatif. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk membuat jurnalis merasa terintimidasi, takut, atau berhenti menyampaikan berita yang dianggap merugikan pihak tertentu. Dengan cara ini, kelompok yang mendukung kandidat bisa mengontrol informasi yang beredar dan membungkam suara-suara kritis di ruang publik.

4. Menekankan polarisasi

Menekankan polarisasi adalah menyebarkan konten di media sosial yang sengaja dibuat untuk memecah belah masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang saling bertengangan, baik karena perbedaan pandangan politik, keyakinan agama, maupun ideologi. Konten semacam ini biasanya dirancang dan

disebarkan secara terstruktur untuk menimbulkan konflik, memperkuat pola piker “kami versus mereka” serta menciptakan ketegangan Masyarakat. Strategi ini tidak hanya bertujuan membangun dukungan kuat bagi kandidat tertentu, tetapi juga melemahkan persatuan solidaritas di antara pendukung lawan politik. Dengan menojolkan perbedaan dan memperburuk suasana, pendekatan ini membuat lawan politik tampak sebagai pihak bersebrangan dengan “kelompok kita” sehingga mengurangi simpati public terhadap mereka.

5. Memanipulasi algoritma

Memanipulasi algoritma platform dalam konteks penelitian ini merujuk pada upaya terorganisir untuk mengakali sistem kerja media sosial agar konten yang mendukung kandidat tertentu bisa tampil lebih sering dan menjangkau lebih banyak orang. Strategi ini biasanya dilakukan dengan cara-cara digital seperti menggunakan klik otomatis (*click farms*), menyebarkan tagar tertentu secara massal, mengaktifkan akun bot, hingga menciptakan interaksi palsu berupa komentar atau like buatan. Semua aktivitas ini bertujuan untuk "menipu" algoritma media sosial yang biasanya memprioritaskan konten populer atau ramai dibicarakan, sehingga konten pro-kandidat akan lebih mudah muncul di beranda pengguna. Dengan begitu, narasi dari pihak lawan menjadi tenggelam dan kurang terlihat oleh publik.

6. Koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication*)

Koordinasi dan komunikasi dalam penelitian ini merujuk pada bagaimana anggota tim *buzzer* bekerja sama dan saling berkomunikasi untuk menjalankan strategi kampanye secara terarah. Koordinasi berarti adanya pembagian tugas yang jelas dan kerja sama antaranggota agar tidak terjadi kesalahan atau tumpang tindih. Sementara itu, komunikasi mencakup pertukaran informasi yang lancar dan cepat, baik melalui rapat,

grup pesan, atau media sosial internal. Kedua aspek ini penting agar pesan kampanye yang disebarluaskan tetap konsisten dan tim dapat cepat merespons isu-isu politik yang muncul di media sosial.

1.9. METODE PENELITIAN

1.9.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian menerapkan metode penelitian kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memahami secara mendalam berbagai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, serta tindakan mereka. Pendekatan ini dilakukan secara menyeluruh melalui deskripsi yang dituangkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks alami, serta menggunakan beragam metode ilmiah (Ummah, 2019). Menurut Creswell, pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari sekelompok orang atau individu (Creswell, 2018). Dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami realitas sebagaimana adanya. Penelitian ini dilakukan dalam konteks alami, sehingga penelitian berusaha mendekati objek atau subjek penelitian di lingkungan mereka sebenarnya, tanpa adanya manipulasi atau pengaturan buatan.

Dalam penelitian ini, fokus peneliti adalah menggali makna-makna yang tersembunyi dalam pengalaman, perilaku, atau pandangan subjek penelitian. Tujuan utama penelitian kuantitatif adalah untuk memahami interaksi sosial, pola pikir, serta nilai-nilai yang dianut oleh individu atau kelompok dalam konteks nyata. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang lingkungan sosial dan budaya, sekaligus membuka peluang untuk mengembangkan teori berdasarkan temuan lapangan. Selain itu, metode ini penting untuk menjamin akurasi dan validitas data melalui proses refleksi dan verifikasi. Berfokus pada Upaya menemukan makna-makna tersembunyi yang terkandung dalam pengalaman, perilaku, atau

pandangan subjek penelitian, sehingga pemahaman yang diperoleh bersifat komprehensif dan kontekstual.

Selain itu, pendekatan ini juga penting untuk memastikan keakuratan dan kebenaran data melalui proses yang reflektif dan verifikatif (Habsy, 2017).

1.9.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, sebagai lokasi utama kegiatan kampanye kandidat nomor 1 pada Pemilihan Bupati 2024. Lokasi ini dipilih karena menjadi pusat aktivitas politik kandidat dan juga tempat di mana aktivitas *buzzer* digital paling aktif dilakukan selama masa kampanye.

1.9.3. Informan / Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau objek yang menjadi fokus utama dalam suatu penelitian, dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, fokus utama tertuju pada individu-individu yang secara langsung terlibat dalam aktivitas kampanye digital, khusus anggota tim *buzzer* kandidat nomor 1 pada pemilihan bupati Ponorogo tahun 2024.

Penelitian ini menggunakan *snowball sampling*, yaitu metode di mana penulis meminta bantuan dari informan awal untuk merekomendasikan atau menunjukkan individu lain yang relevan dan memiliki informasi penting terkait topik penelitian. Teknik ini sangat berguna ketika penulis sulit mengakses seluruh jaringan partisipan secara langsung, terutama dalam konteks kelompok tertutup atau yang sifatnya terbatas seperti tim *buzzer*. Melalui teknik ini, data yang dikumpulkan menjadi lebih luas dan mendalam karena jaringan informan berkembang secara bertahap berdasarkan rekomendasi informan sebelumnya (Naderifar et al., 2017).

Penelitian ini mempertimbangkan sejauh mana informan memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan aktif dan strategi komunikasi politik melalui media sosial yang dijalakan kandidat tersebut. Para informan terdiri dari anggota inti tim media sosial,

pengelolaan akun-akun pendukung diberbagai platform seperti Facebook, Instagram, Tiktok, dan Whatsaap, serta pihak-pihak yang berperan sebagai kreator konten atau pengendali narasi daring. Dengan melinatkan informan-informan yang memiliki posos yang berbeda dalam tim *buzzer*, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai strategi yang digunakan, pola komunikasi yang dijalankan, hingga dinamika internal yang memengaruhi efektivitas penyebaran pesan politik di media sosial. Informasi yang diperoleh dari informan ini menjadi landasan penting dalam analisis strategi *cyber* politik yang dijalankan oleh kandidat nomor 1 dalam kontestasi politik di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2024.

1.9.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap yang sangat krusial dalam proses penelitian. Teknik pengumpulan data yang tepat akan menghasilkan data yang akurat dan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Sebaliknya, jika teknik yang digunakan tidak sesuai, maka data yang diperoleh bisa menjadi tidak valid. Oleh karena itu, proses ini harus dilakukan secara hati-hati, mengikuti prosedur dan prinsip-prinsip penelitian kualitatif yang telah dijelaskan sebelumnya. Ketidaktepatan atau kekeliruan dalam pengumpulan data dapat menimbulkan dampak serius, seperti diperolehnya data yang tidak dapat dipercaya, sehingga hasil penelitian menjadi lemah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal ini menjadi lebih berisiko apabila hasil penelitian tersebut digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan atau kebijakan publik. Di dalam metode penelitian kualitatif data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif yaitu; 1). Wawancara, 2). Observasi, 3). Dokumentasi, dan 4). Diskusi terfokus (*Focus Group Discussion*). Namun pada penelitian ini penulis hanya menggunakan dua metode yaitu metode wawancara dan dokumentasi (Ummah, 2019).

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara penulis dan informan atau narasumber, dengan tujuan menggali informasi yang mendalam mengenai topik atau permasalahan yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian kualitatif, wawancara digunakan untuk memahami pandangan, pengalaman, dan pengetahuan subjek penelitian secara lebih detail (Moleong, 2017).

Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang telah ditentukan berdasarkan metode purposive sampling dan snowball sampling, yaitu mereka yang memiliki peran strategis dan keterlibatan aktif dalam aktivitas tim *buzzer*. Beberapa wawancara dilakukan secara tatap muka, sementara yang lainnya dilakukan melalui media komunikasi daring seperti WhatsApp Voice Note, dan WhatsApp call, menyesuaikan dengan ketersediaan dan kondisi informan. Seluruh proses wawancara direkam, baik melalui alat perekam suara maupun pencatatan manual, untuk memastikan data yang diperoleh dapat ditelaah kembali secara akurat saat proses analisis. Penulis juga menjaga etika penelitian dengan meminta persetujuan dari informan sebelum melakukan perekaman serta menjamin kerahasiaan identitas mereka sesuai dengan prinsip etika dalam penelitian sosial.

Menurut Creswell (2015) terdapat lima Langkah langkah wawancara yang sistematis yaitu:

1) Pembukaan

Pada tahap awal wawancara, penulis memulai dengan memperkenalkan diri secara jelas kepada informan, termasuk menyampaikan identitas, latar belakang institusi, serta peran penulis dalam kegiatan tersebut. Setelah itu, penulis menjelaskan secara rinci tujuan dari penelitian yang sedang dilakukan, mengapa informan dipilih sebagai narasumber, dan bagaimana data yang diberikan akan

digunakan dalam analisis. Penulis juga menyampaikan bahwa seluruh proses wawancara dapat direkam untuk keperluan dokumentasi dan analisis data, namun sebelumnya terlebih dahulu meminta izin atau persetujuan dari informan secara etis, agar hak privasi dan kenyamanan informan tetap dihormati.

2) Pertanyaan awal

Pertanyaan awal dalam wawancara digunakan untuk membangun suasana yang santai dan akrab agar informan merasa nyaman saat mulai berbicara. Biasanya, penulis mengajukan pertanyaan ringan atau bersifat umum, seperti menanyakan latar belakang pekerjaan, aktivitas sehari-hari, atau keterlibatan awal informan dalam kegiatan tertentu. Tujuannya bukan untuk langsung menggali data inti, melainkan untuk mencairkan suasana, menghilangkan rasa gugup, dan menciptakan hubungan yang lebih hangat antara penulis dan informan. Dengan begitu, informan akan merasa lebih terbuka dan bersedia memberikan jawaban yang jujur serta mendalam saat memasuki pertanyaan utama penelitian.

3) Pertanyaan inti

Pertanyaan inti dalam wawancara biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan terbuka dan mendalam, artinya penulis tidak memberikan pilihan jawaban, tetapi mendorong informan untuk menjelaskan pengalaman, pandangan, atau pengetahuan mereka secara bebas dan luas. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk menggali informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian. Agar jawaban yang diberikan lebih lengkap dan detail, penulis sering menambahkan pertanyaan lanjutan atau *probes*, seperti “Bisa diceritakan lebih lanjut?” atau “Apa ada contohnya?” Teknik ini membantu peneliti memperoleh penjelasan yang lebih dalam, memperjelas pernyataan

informan, serta menghindari jawaban yang terlalu singkat atau kurang spesifik. Dengan begitu, informasi yang dikumpulkan menjadi lebih kaya dan relevan untuk dianalisis.

4) Pertanyaan penutup

Pada bagian akhir wawancara, penulis mengajukan pertanyaan penutup yang berfungsi untuk mengakhiri percakapan dengan baik sekaligus memastikan tidak ada informasi penting yang terlewat. Dalam tahap ini, peneliti biasanya menanyakan apakah informan memiliki hal lain yang ingin disampaikan terkait topik yang dibahas, atau apakah ada informasi tambahan yang mungkin belum sempat dijelaskan sebelumnya. Selain itu, penulis juga dapat meminta rekomendasi atau saran kontak dari individu lain yang dianggap relevan dan bisa memberikan informasi tambahan untuk mendukung penelitian. Langkah ini penting, terutama dalam teknik *snowball sampling*, agar jaringan informan dapat berkembang dan data yang dikumpulkan menjadi lebih komprehensif.

5) Penutupan

Setelah wawancara selesai, penulis mengucapkan terima kasih kepada informan atas waktu, kerja sama, dan informasi yang diberikan. Penulis menjamin bahwa seluruh data, termasuk rekaman dan isi wawancara, akan dijaga kerahasiaannya dan tidak digunakan di luar kepentingan penelitian. Identitas informan tidak akan dicantumkan secara langsung dalam laporan atau publikasi. Penulis juga menyampaikan kemungkinan tindak lanjut, seperti klarifikasi atau wawancara tambahan, yang hanya akan dilakukan dengan persetujuan informan terlebih dahulu.

b. Dokumentasi

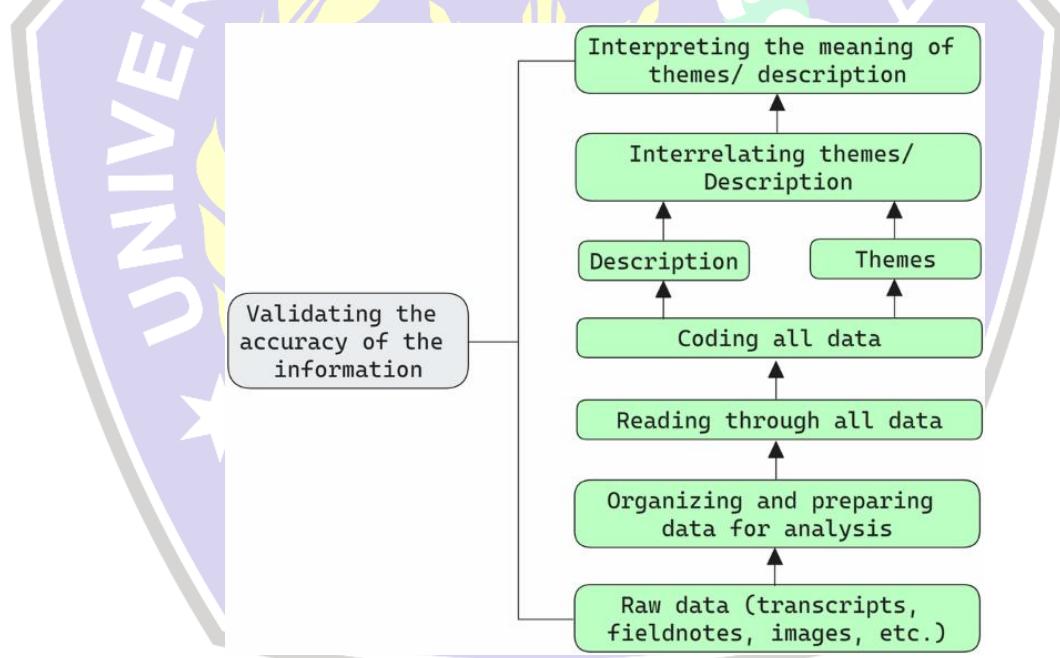
Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Teknik dokumentasi bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara, serta untuk memberikan gambaran faktual dan konkret mengenai aktivitas tim *buzzer* kandidat nomor 1 dalam Pemilu Bupati Ponorogo tahun 2024. Dalam konteks ini, dokumentasi mencakup pengumpulan dan analisis berbagai jenis tertulis, visual, maupun digital yang berkaitan dengan aktivitas komunikasi politik yang dilakukan oleh tim *buzzer*. Data yang dikumpulkan meliputi unggahan di media sosial seperti postingan, video, caption, komentar, serta grafik interaksi pada platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Selain itu penulis juga mengumpulkan dokumen public internal termasuk pamphlet digital, poster kampanye online, tangkap layar (screenshot) percekapan grup daring serta arsip strategi konten yang dipublikasikan. Data ini diperoleh baik secara langsung dari tim pendukung maupun melalui penelusuran mandiri di media sosial.

Melalui teknik dokumentasi, penulis dapat melihat pola komunikasi digital tim *buzzer*, termasuk gaya bahasa, waktu dan frekuensi unggahan, serta respon audiens terhadap pesan yang disampaikan. Dokumentasi juga memperkuat hasil wawancara, sehingga meningkatkan validitas data dan pemahaman tentang strategi cyber politik yang digunakan. Dokumen yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi narasi, simbol politik, serta strategi visual dan verbal dalam membangun citra kandidat. Dengan begitu, teknik ini menjadi pelengkap data utama dan memberi dasar kuat untuk menyimpulkan strategi tim *buzzer* dalam memengaruhi opini publik selama kampanye Pemilu 2024 di Ponorogo.

1.9.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian untuk mengolah dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan agar

dapat menghasilkan informasi yang valid dan bermakna. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan dengan mendeskripsikan, menafsirkan, dan memahami makna dan data non-numerik, seperti hasil wawancara, observasi, dokumentasi, maupun catatan lapangan. Proses analisis biasanya dimulai dengan pengorganisasian data, pembacaan secara menyeluruh, identifikasi pola atau tema, hingga pengkategorian dan penafsiran makna yang terkandung dalam data tersebut. Pada penelitian ini, analisis data yang dilakukan menggunakan pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan yang diuraikan oleh Creswell (2018). Dalam bukunya, Creswell menjelaskan secara rinci langkah-langkah analisis data yang tepat untuk penelitian kualitatif. Tahapan berikut merupakan proses yang sistematis dalam melakukan analisis data:



Gambar 1. 2 Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif

Sumber : Creswell (2018)

a. Mengelompokkan dan mempersiapkan data untuk di analisis

Dalam proses pengelompokan dan persiapan data untuk dianalisis, dapat dilakukan melalui wawancara, pemilahan data yang telah diperoleh, pencatatan hasil observasi lapangan, pembuatan katalog, atau pengumpulan data secara visual seperti melalui rekaman, video, foto, dan sebagainya. Selain itu, data juga perlu disortir dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan analisis.

b. Membaca atau melihat keseluruhan data

Dalam tahap awal membaca atau menelaah data yang diperoleh, langkah pertama yang dilakukan adalah menarik kesimpulan umum untuk memahami makna atau inti dari data yang telah dikumpulkan. Ini mencakup menelaah apa yang disampaikan oleh narasumber serta menggali pokok-pokok dan kedalaman informasi yang diberikan. Proses ini dapat dilakukan dengan cara meninjau kembali transkrip wawancara maupun catatan lapangan.

c. Membuat coding pada data

Coding atau memberi kode pada data adalah proses menyusun dan mengelompokkan data berdasarkan jenis atau kategori tertentu. Misalnya, memberikan kode pada nama-nama tokoh atau informan dalam penelitian agar lebih mudah dianalisis. Proses ini dilakukan setelah data dikumpulkan dari lapangan, baik berupa tulisan maupun gambar, lalu dikelompokkan sesuai kategori tertentu dan diberi label atau kode yang sesuai dengan isi dari kategori tersebut.

d. Membuat deskripsi dan tema

Dengan menggunakan istilah atau kode yang telah dibuat, penulis bisa menyusun gambaran tentang informan dan menentukan tema atau kategori yang akan dianalisis. Gambaran ini harus ditulis secara rinci, mencakup latar belakang informan, lokasi, dan hal-hal lain yang relevan. Kode yang digunakan juga bisa membantu penulis dalam menyusun sub-bab pembahasan berdasarkan data yang sudah terkumpul. Setiap sub-bab sebaiknya memuat berbagai sudut

pandang dari informan lain, dilengkapi dengan kutipan langsung atau referensi untuk memperkuat keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, pendekatan ini memungkinkan penulis mengaitkan satu data dengan data lainnya jika dirasa saling berhubungan, sehingga tercipta uraian yang lebih dalam dan menyeluruh antar sub-bab.

e. Merepresentasikan deskripsi dan tema

Setelah melalui tahapan sebelumnya, deskripsi dan sub-bab hasil penelitian bisa disusun dalam bentuk narasi kualitatif. Cara ini dianggap paling tepat untuk menyampaikan hasil analisis data. Narasi bisa berisi urutan kejadian dari fenomena yang diteliti, penjelasan detail dari temuan yang diperoleh, termasuk sub-tema, gambaran lengkap peristiwa, sudut pandang para informan, kutipan langsung, atau hasil diskusi yang saling berkaitan. Selain dalam bentuk tulisan, data juga bisa diperkuat dengan grafik, gambar, atau tabel. Penulis juga dapat menyertakan foto lokasi penelitian serta menyajikan informasi tentang para informan dalam bentuk tabel deskriptif.

1.9.6. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah ukuran untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dari sebuah penelitian benar dan dapat dipercaya. Fokus utamanya adalah pada isi atau informasi dari data itu sendiri, bukan pada sikap atau jumlah orang yang terlibat. Dalam penelitian, uji keabsahan biasanya melibatkan dua hal penting, yaitu validitas dan reliabilitas. Perbedaannya terletak pada apa yang diuji dalam penelitian kuantitatif, yang diuji adalah instrumen atau alat pengumpulan data, sementara dalam penelitian kualitatif yang diuji justru data yang diperoleh. Dalam konteks penelitian kualitatif, data dikatakan valid jika apa yang disampaikan peneliti benar-benar sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan. Jadi, tidak boleh ada perbedaan antara laporan penulis dan kejadian sebenarnya yang diteliti. Oleh karena itu untuk memastikan keabsahan data adalah Refleksivitas (*Reflexivity*), Kredibilitas (*Credibility*), Transferabilitas (*Transferability*). Menurut

Sundler et al., (2019) dalam keabsahan data terdapat beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Refleksivitas (*Reflexivity*)

Refleksivitas (*Reflexivity*) adalah kesadaran penulis terhadap posisi, sikap, latar belakang, dan pandangan pribadinya yang bisa memengaruhi proses penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga analisis. Dalam hal ini, penulis harus secara terus-menerus melakukan introspeksi dan evaluasi diri agar tetap objektif dan tidak mencampuradukkan pendapat pribadi dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Dengan refleksivitas, penulis diharapkan mampu menjaga jarak secara emosional dan profesional terhadap objek yang diteliti, sehingga hasilnya tidak bias atau berat sebelah.

b. Kredibilitas (*Credibility*)

Kredibilitas (*Credibility*) merupakan salah satu kriteria penting untuk memastikan bahwa data dan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian benar dan dapat dipercaya. Artinya, hasil penelitian harus bisa diyakini kebenarannya, baik oleh pembaca yang menilai secara kritis maupun oleh responden yang memberikan informasi. Sebuah penelitian kualitatif dianggap memiliki kredibilitas yang tinggi jika hasil temuannya benar-benar mampu menggambarkan secara mendalam permasalahan yang diteliti, serta menjelaskan secara jelas latar belakang, proses, dinamika kelompok sosial, atau pola interaksi yang rumit dan beragam (Susanto et al., 2023).

c. Transferabilitas (*Trasfability*)

Transferabilitas (*Trasfability*) berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian bisa berguna dan relevan untuk diterapkan dalam konteks atau situasi lain yang serupa. Transferabilitas membantu menilai apakah data yang diperoleh benar-benar valid dan apakah penelitian tersebut bisa memberikan tambahan pengetahuan yang bermakna. Oleh karena itu, data yang dihasilkan harus disajikan dengan jelas agar mudah dipahami, sehingga orang lain bisa

menggunakannya sebagai acuan dalam penelitian berbeda yang memiliki latar belakang atau kondisi yang mirip. Singkatnya, transferabilitas menekankan pentingnya relevansi, manfaat, dan kemungkinan penerapan hasil studi di luar konteks penelitian awal (Sundler et al., 2019).

